

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.I. Identifikasi Masalah

Pada zaman ini di dalam otonomi daerah dan desentralisasi, maka aspek kemajuan perekonomian merupakan hal yang sangat penting yang diupayakan oleh masing-masing daerah di Indonesia. Konsep desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia sendiri dilandasi oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan serta konsepnya. Ketentuan dalam perwujudan otonomi daerah di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang akhirnya diganti menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kemudian, juga terdapat Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang juga diganti menjadi Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 perihal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Menurut Joeniarto (1992), desentralisasi diartikan sebagai pemberian wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Selain itu, desentralisasi juga diartikan sebagai pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Soedjito, 1990). Adanya desentralisasi telah membuat perubahan yang berarti dalam tatanan pemerintahan Indonesia. ketidakefektifan yang semula diciptakan dengan panjangnya alur dari sentralisasi yang dilaksanakan sebelumnya telah dibuat lebih baik oleh adanya desentralisasi.

Salah satu bentuk dari desentralisasi itu adalah desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal menurut De Mello (2000) adalah pemindahan dan penyerahan sumber-sumber pendapatan dan faktor-faktor belanja ke daerah untuk mengurangi birokrasi pemerintahan. Desentralisasi fiskal merupakan sebuah alat yang digunakan oleh pemerintah dalam mengelola pembangunan untuk mendorong perekonomian di daerah (Kusuma, 2016). Selain itu, desentralisasi fiskal telah menjadi rujukan penting untuk menjadikan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut (Oates, 1993)

Sebagai bagian dari kesatuan Indonesia, Sumatera Barat tentu juga berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi ini. Adanya pelaksanaan desentralisasi diharapkan mampu membuat perubahan bagi perekonomian Sumatera Barat. Hal ini dikarenakan pengaturan dan pengalokasian anggaran dan pembiayaan yang langsung diserahkan kepada daerah. Selain itu, menurut Khusaini (2006), adanya desentralisasi fiskal dengan kewenangan yang diberikan kepada daerah diharapkan dapat memberikan bobot daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah guna mewujudkan kemakmuran daerah. Dengan demikian, diharapkan hal ini dapat membuat lebih efektif dan efisiennya anggaran daerah tersebut. Namun, program desentralisasi yang digadang-gadang dapat memberikan kontribusi yang besar dalam pemajuan perekonomian dan penciptaan pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum bisa dikatakan memberikan hasil yang menggembirakan.

Pada beberapa tahun setelah diadakannya desentralisasi, pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat masih belum cukup memuaskan. Melihat pada beberapa tahun terakhir, pada tahun 2004, pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat yang dilihat dari laju pertumbuhan PDRB-nya berada pada angka 5,47 persen. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sebesar 5,47 persen pada tahun 2004 tersebut mengalami kenaikan pada tahun-tahun berikutnya, hingga pertumbuhan ekonomi tertinggi berada di tahun 2008 senilai 6,88 persen. Sedangkan, di tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu jatuh menjadi 4,28 persen.

Pada tahun-tahun berikutnya terjadinya kecenderungan menurun pada pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat, dimana di tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sebesar 5,88 persen. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang dilihat perkembangannya terus menunjukkan adanya penurunan. Penurunan ini dapat dilihat hingga tahun terakhir yaitu tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat hanya tumbuh sebesar 5,05 persen. Pertumbuhan sebesar 5,05 persen ini turun dibandingkan tahun sebelum ini yaitu sebesar 5,14 persen, dan angka pertumbuhan ekonomi ini adalah dibawah angka pertumbuhan ekonomi nasional. selain pada periode tersebut, pada tahun-tahun seperti tahun 1990 – 1994

juga terjadi kecenderungan yang menurun pada pertumbuhan ekonomi, lalu juga pada tahun 1996 – 2000 juga terjadi kecenderungan yang menurun pada pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.

Kenaikan dan penurunan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat tentu dipengaruhi berbagai aspek. Aspek penentu yang berimbang pada pertumbuhan ekonomi berdasarkan Jhingan (2007) diantaranya sumber daya alam dan akumulasi modal. Selain itu, juga terdapat pengaruh dari jumlah penduduk, investasi, tenaga kerja, ekspor, belanja pemerintah, perkembangan teknologi, dan masih banyak faktor lainnya. Belanja pemerintah merupakan salah satu yang diperkirakan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.

Belanja pemerintah dikatakan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi didasarkan pada teori yang dikemukakan oleh J. M. Keynes. Teori Keynes berpendapat bahwa belanja pemerintah sebagai bagian dari permintaan agregat, yang merupakan bentuk intervensi pemerintah terhadap perekonomian nantinya akan menciptakan stabilitas perekonomian. Menurut Sukirno (2013), implikasi dari Teori Keynes yaitu demi menanggung pertumbuhan yang konstan atau kukuh maka peran pemerintah dibutuhkan untuk menata sistem ekonomi lewat *monetary policy* ataupun *fiscal policy*.

Belanja pemerintah adalah salah satu bentuk pengimplementasian dari desentralisasi fiskal. Menurut Suparmoko (2013), belanja publik merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang berguna untuk meningkatkan produksi, menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, apakah hal yang sama juga akan memberikan efektifitas anggaran fiskal yang diserahkan ke daerah sehingga membuat perekonomian daerah itu lebih maju.

Belanja pemerintah menurut Peraturan Perundang-Undangan No. 12 Tahun 2019, belanja pemerintah sendiri pengalokasiannya terbagi atas beberapa cabang pengeluaran seperti pengeluaran operasi, pengeluaran modal, pengeluaran tak terduga, dan pengeluaran transfer. Pada beberapa tahun terakhir yang dapat dilihat pada tahun 2004, jumlah belanja pemerintah Sumatera Barat adalah sebesar Rp. 4,40 triliun rupiah. Realisasi belanja pemerintah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Sumatera Barat tahun demi tahun kecenderungannya menaik, dimana di tahun 2009

belanja pemerintah Provinsi Sumatera Barat mencapai Rp. 9,40 triliun rupiah. Dengan rata-rata pertumbuhan belanja pemerintah Sumatera Barat dari tahun 2004-2009 adalah 15,01 persen. Pada tahun 2014, belanja pemerintah Daerah Sumatera Barat mencapai Rp. 21 triliun rupiah. Pada periode ini rata-rata pertumbuhannya sebesar 19,12 persen dari tahun 2010-2014 dan terus terjadi peningkatan setiap tahunnya. Hingga pada tahun 2019, belanja pemerintah daerah Sumatera Barat telah mencapai lebih dari Rp. 31,40 triliun rupiah. Dengan pertumbuhan belanja pemerintah rata-rata selama tahun 2015-2019 adalah sebesar 7,78 persen.

**Tabel 1.1. Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Pemerintah Sumatera Barat Tahun 2004-2019**

No	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	Belanja Pemerintah (Juta Rupiah)
1	2004	5,47	Rp4.395.399
2	2005	5,73	Rp5.150.365
3	2006	6,14	Rp6.045.139
4	2007	6,34	Rp6.713.058
5	2008	6,88	Rp8.052.067
6	2009	4,28	Rp9.404.391
7	2010	5,6	Rp14.298.112
8	2011	6,34	Rp15.856.437
9	2012	6,31	Rp17.675.535
10	2013	6,08	Rp19.683.676
11	2014	5,88	Rp21.622.468
12	2015	5,53	Rp24.255.719
13	2016	5,26	Rp25.511.598
14	2017	5,29	Rp26.894.124
15	2018	5,14	Rp29.109.668
16	2019	5,05	Rp31.395.359

*Sumber: Data BPS Sumatera Barat diolah*

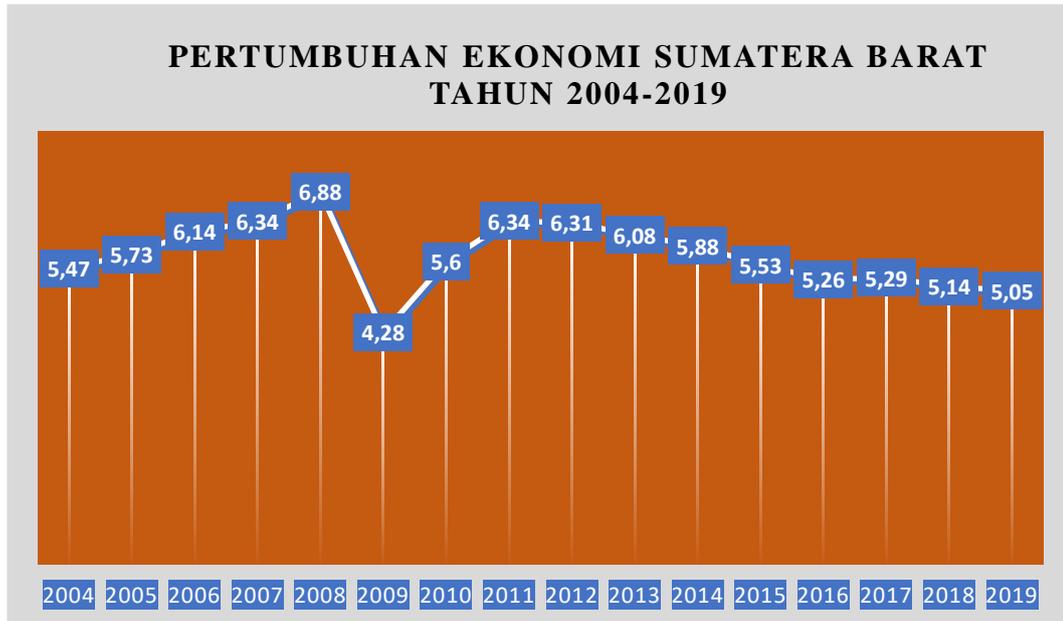
Dari tabel 1.1 dapat dilihat data 16 tahun terakhir terjadinya kenaikan dari belanja pemerintah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Sumatera Barat setiap

tahunnya. Melihat perkembangan data belanja pemerintah Sumatera Barat dari tahun ketahun dapat dikatakan bahwa belanja pemerintah Sumatera Barat selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2019. Dengan adanya peningkatan belanja pemerintah yang telah direalisasikan oleh Pemerintah Sumatera Barat, diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi bagi Sumatera Barat. Sehingga, pada akhirnya dapat menciptakan kemajuan bagi daerahnya tersebut.

Belanja pemerintah diharapkan mampu memberikan stimulus bagi perekonomian Sumatera Barat. Menurut Teori yang dikemukakan oleh Rostow dan Musgrave, menyatakan bahwa belanja pemerintah diperlukan untuk mendorong perekonomian untuk maju ketahap selanjutnya. Belanja pemerintah yang merupakan salah satu dari elemen permintaan agregat juga akan mempengaruhi perekonomian. Kehadiran dari belanja pemerintah akan memberikan efek berganda pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan, pos-pos pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah seperti halnya belanja modal akan menciptakan investasi nantinya. Terciptanya investasi akan mendorong peningkatan output dan efek yang diberikan adalah efek *multiplier* atau berganda. Walaupun efek multiplier ini tidak langsung dalam jangka pendek, namun ada *lag* yang nanti akan berefek terhadap perekonomian.

Efek multiplier yang diharapkan dari adanya belanja pemerintah salah satunya adalah kepada kenaikan pertumbuhan ekonomi. Namun, Jika dibandingkan dengan perkembangan pertumbuhan ekonominya, pada tahun yang sama yaitu tahun 2004 sampai tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat justru terjadi penurunan atau perlambatan.

**Grafik 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2004-2019**



*Sumber: Data BPS Sumatera Barat diolah (2020)*

Dari grafik 1.1. dapat dilihat bahwa terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat setiap tahunnya, yang mulai pada tahun 2011 sampai 2019. Padahal, dapat dilihat bahwa pada tahun yang sama jumlah belanja pemerintah yang dialokasikan untuk Sumatera Barat justru mengalami kenaikan. Merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Keynes (Solikin, 2018), permintaan agregat yang merupakan bentuk intervensi pemerintah terhadap perekonomian nantinya akan menciptakan stabilitas perekonomian dan menciptakan pertumbuhan ekonomi. Implikasi dari Teori Keynes yaitu demi menjaga pertumbuhan tetap konstan atau kokoh dibutuhkan peran pemerintah untuk menata system ekonomi apakah itu melalui kebijakan moneter ataupun kebijakan fiskal (Sukirno, 2013).

Temuan dari Nasution, dkk (2020) didapatkan sejalan dengan Teori Keynes. Selanjutnya, Teori yang dikemukakan oleh Keynes juga ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Said, dkk (2010), dengan judul “Foreign Investment, Government Expenditure, and Economic Growth in Malaysia” di Malaysia. Dalam penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa rasio belanja pemerintah berhubungan positif terhadap *Gross Domestic Product* (GDP) mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di Malaysia. Dalam penelitian tersebut didapatkan bahwa belanja pemerintah mempunyai dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang telah dilakukan tersebut memiliki korelasi yang positif

variabel belanja pemerintah dengan variabel pertumbuhan ekonomi, dan hal ini sesuai dengan teori yang telah dikemukakan oleh Keynes.

Dari hal diatas tentu ini menjadi sebuah tanda tanya, apakah kegiatan perekonomian yaitu belanja pemerintah yang dilakukan Sumatera Barat di atas dalam rangka untuk Ekspansi ekonomi memiliki keterkaitan dan pengaruh dengan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Hal ini mengingat dengan kecenderungan yang menurun pada pertumbuhan ekonomi tapi belanja pemerintah justru mengalami kenaikan.

Oleh karena itulah, peneliti tertarik dan mencoba meneliti hubungan antara variabel perekonomian di atas bertajuk **Analisis Hubungan Jangka Panjang Antara Belanja Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat.**

## **1.2. Perumusan Masalah**

Sumatera Barat merupakan bagian provinsi di Indonesia tentu ikut sebagai bagian pelaksanaan desentralisasi bersama-sama dengan provinsi lainnya di Indonesia. Di tengah desentralisasi itu, kemajuan perekonomian daerah tentu merupakan aspek penting yang diusahakan mati-matian oleh Sumatera Barat. Salah satu aspek kemajuan dalam perekonomian itu ialah pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas produksi yang dihasilkan oleh suatu negara atau wilayah dalam satu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi didukung oleh berbagai faktor.

Sebagai wilayah desentralisasi, Sumatera Barat diberi wewenang untuk menentukan fiskal daerahnya sendiri sesuai dengan konsep desentralisasi. Pemerintah Sumatera Barat dalam rangka menjalankan tugasnya selalu berupaya dalam menciptakan kesejahteraan dan meningkatkan perekonomian negaranya. Salah satu cara pemerintah mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan mengalokasikan sejumlah uang atau dana untuk daerahnya, hal ini dikenal sebagai belanja pemerintah.

Melihat kondisi perekonomian Sumatera Barat khususnya belanja pemerintah Sumatera Barat yang diperkirakan mempengaruhi pertumbuhan ekonominya. Pada beberapa tahun terakhir, jumlah belanja pemerintah justru mengalami kecenderungan yang menaik. Namun, pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan dipengaruhi oleh variabel ekonomi tersebut malah menunjukkan

adanya penurunan. Oleh karena itulah, peneliti mengangkat rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. bagaimana hubungan jangka panjang dan jangka pendek antara belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat selama tahun 1990-2019?”
2. bagaimana hubungan antara belanja pemerintah terhadap investasi Sumatera Barat

### **1.3. Tujuan Umum Penelitian**

Tujuan adanya penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan menjabarkan secara lebih terinci mengenai fenomena terkait dengan variabel yang diteliti. Secara umum tujuan penelitian untuk menganalisis ada tidaknya hubungan dari variabel ekonomi makro yaitu belanja pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adanya studi ini diharapkan berkontribusi dan berguna untuk khalayak banyak, dalam hal:

#### **1) Manfaat Teoritis**

Dapat memberikan manfaat akademik bagi pembaca, dimana dengan studi atau temuan ini dapat menyumbang pengetahuan terkait dengan judul ini. Serta, sebagai acuan untuk peneliti-peneliti setelahnya yang relevan dengan judul ini.

#### **2) Manfaat Praktis**

Penelitian ini sekiranya mampu bersumbangsih terhadap penentuan kebijakan bagi pihak-pihak terkait dengan judul atau indikator ekonomi yang diteliti.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh dari penelitian ini. Dalam penelitian ini terdapat lima bagian atau bab. Berikut merupakan sistematika dalam penelitian ini yaitu:

#### **1. BAB I: Pendahuluan**

Dalam bab 1 pendahuluan ini, terdiri atas lima (5) bagian yakni: indentifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan umum penelitian, dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

## **2. BAB II: Kerangka Teori**

Bagian ini mencakup kajian literatur yang berkaitan dengan variabel-variabel yang diteliti. Dalam bab dua ini juga terdapat teori-teori yang mendukung variabel yang diteliti, serta juga dilengkapi dengan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian ini, kerangka analisis, serta hipotesis yang digunakan.

## **3. BAB III: Metodologi Penelitian**

Bagian tiga (3) ini pembahasan yang dibahas adalah tujuan spesifik penelitian, waktu dan tempat penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, serta teknik analisis data.

## **4. BAB IV: Hasil Penelitian**

Bagian ini menjabarkan hasil penelitian nan ditemukan pada analisis statistik yang dilakukan serta memaparkan korelasi antar variabel.

## **5. BAB V: Kesimpulan dan saran**

Bagian kelima ini adalah bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang diberikan oleh peneliti terhadap pihak-pihak terkait dalam penelitian ini dan masyarakat banyak secara umumnya.